

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak masa Rasulullah Saw sudah berjalan aktivitas menuntut ilmu. Pada periode Mekkah ini dikenal kegiatan pendidikan di Dar al-Arqam, yaitu menuntut ilmu agama di rumah Arqam bin Abi al-Arqam, di mana Rasulullah Saw dan para sahabat *radhiallahu 'anhum* yang telah masuk Islam secara sembunyi-sembunyi aktif dalam kegiatan pembelajaran agama Islam.¹ Tempat itu sekaligus untuk menguatkan keimanan dan militansi orang-orang yang baru masuk Islam, yang disebut *al-Sabiqun al-Awwalun*, sehingga mereka yang dididik dan dibina di sini kelak menjadi para pejuang dan pemimpin Islam yang tangguh.² Setelah mendapatkan pengajaran agama dari Rasulullah Saw mereka mendakwahkan, menyebarkan dan mengajarkan agama Islam ke tengah masyarakat.

Setelah Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Medinah, kegiatan pembelajaran agama terus diaktifkan kembali dengan pusatnya di Masjid Nabawi Medinah, di mana kaum muslimin aktif belajar agama Islam dalam berbagai aspeknya, baik untuk memperkuat ketauhidan, mengenai ibadah, hukum-hukum maupun memperbaiki akhlak. Bahkan di sebagian bangunan Masjid Nabawi

¹Abdul Qadir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), h. 7.

²Muhammad Ridha, *Muhammad Rasulullah Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H), h. 75.

disediakan ruangan khusus bagi *Ahl al-Shuffah* sebagai kediaman orang-orang yang kurang mampu tetapi giat belajar agama.³

Di masa Rasulullah dan para sahabat, usaha-usaha pendidikan Islam masih dilaksanakan secara sederhana, belum dikelola secara professional dan klasikal sebagaimana sekarang ini. Namun mengacu kepada usaha-usaha Rasulullah dan para sahabat dalam menggiatkan usaha-usaha pendidikan, maka para ulama kemudian juga aktif sekali dalam mengelola kegiatan pendidikan. Mekkah dan Medinah (*al-Haramain*) adalah dua kota suci umat Islam yang sangat terkenal dalam hal kegiatan pendidikan Islam, di mana sejumlah calon ulama berdatangan dari negeri-negeri Islam, termasuk dari Nusantara untuk belajar agama Islam.⁴ Begitu juga kota-kota lain seperti Kairo Mesir yang terkenal dengan Universitas al-Azhar dan Baghdad Irak yang terkenal dengan *Bait al-Hikmah*.⁵ Mereka itu sekembalinya ke negeri/daerahnya masing-masing juga menjadi ulama dan mengembangkan pendidikan Islam.

Di Nusantara (Indonesia) para ulama juga aktif mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Mereka dengan penuh semangat menyumbangkan dana, tenaga dan kehidupan untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan Islam. Bentuk lembaga pendidikan pada masa lalu terutama berupa pondok

³Muhamad Husain Haekal, *Hayatu Muhammad*, Alih Bahasa Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), h. 193.

⁴Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad VIII & XVIII*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), h. 88.

⁵Muhammad Mujlom Khan, *The Muslim 100 The Lives, Thought and Achievement of the Most Influential Muslims in History*, Alih bahasa Wiyanto Suud dan Khairul Imam, (Jakarta: Mizan, 2010), h. 209.

pesantren dan madrasah, yang dulu sangat mengutamakan pendidikan agama dan dianggap sebagai pelajaran wajib, dengan mengenyampingkan pendidikan umum. Terlebih karena berdirinya pondok pesantren dan madrasah pada umumnya digerakkan dan dikelola oleh para ulama tradisional, yang basis pengetahuan atau pendidikannya memang semata-mata agama.

Pesantren pada umumnya adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam, dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Tradisional di sini maksudnya lembaga pendidikan pesantren ini sudah hidup sejak ratusan tahun yang silam dan telah menjadi bagian yang mendalam dalam sistem kehidupan dan pendidikan Islam di Indonesia dan telah pula banyak mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa.⁶

Kebanyakan pesantren memilih label tradisional, yang kadangkala juga diistilahkan dengan pesantren salafiyah, yang kegiatan pembelajarannya banyak menggunakan metode *sorogan* dan *bandongan* atau wetonan. Dalam metode sorogan, murid dan kyai berhadap-hadapan dalam mempelajari suatu kitab. Metode ini umumnya lebih efektif mengantarkan santri/murid menjadi orang alim, yakni yang mampu membaca kitab kuning berbahasa Arab. Sedangkan dalam metode bandongan, sejumlah murid diajar oleh ustadz, seperti halnya dalam sistem klasikal.⁷

⁶Mastuhu, *Dinamika Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: INIS, 1994), h. 55.

⁷Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), h.28.

Pengutamaan pendidikan agama di satu sisi dan pengabaian pendidikan umum di sisi lain berakibat terjadinya dikotomi (pemisahan) antara pendidikan agama dengan umum, seolah-olah keduanya berbeda dan berlawanan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seolah-olah hanya memprioritaskan mempelajari ilmu-ilmu agama untuk kehidupan ukhrawi dan mengenyampingkan ilmu-ilmu duniawi. Hal ini juga berbanding terbalik dengan lembaga-lembaga pendidikan umum, yang hanya mempelajari pendidikan umum dan hampir meniadakan pendidikan agama.

Di masa penjajahan Belanda, keadaan ini diperparah oleh kebijakan politik pemerintah kolonial yang cenderung mencurigai, mendiskreditkan dan tidak mau membantu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah. Di masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendells (1811-1816), pihak penjajah beranggapan bahwa *Mohammedaans Gods Dienst Onderwys* (lembaga pendidikan Islam) seperti madrasah, pondok pesantren, masjid, surau tidak perlu dibantu bahkan harus diawasi. Alasannya, pondok pesantren dan madrasah itu merupakan sarana meningkatkan iman dan meninggikan akhlak rakyat yang kemudian menjadi sumber semangat perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan umum tentang persekolahan (Staatsblaad Nomor 4 tahun 1818) yang mengatur pengawasan secara ketat sekolah-sekolah agama Islam. Lembaga-lembaga pendidikan agama dibiarkan hidup sendiri apa adanya tanpa pengakuan dan bantuan dari pemerintah

penjajah, kecuali hanya dicurigai dan dikekang dalam bentuk peraturan dan pengawasan yang merugikan.⁸

Kalau pun pemerintah penjajah mau membantu, nilainya sangat kecil. Otto Iskandar Dinata dalam pidatonya di depan Volksraad (DPR era kolonial) tahun 1928 menyatakan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah Belanda kepada pondok pesantren dan madrasah hanya F. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus gulden). Hal itu merupakan hinaan, karena bantuan itu seharusnya diberikan sebesar F.1.000.000, mengingat pondok pesantren dan madrasah menyangkut keperluan 50 juta penduduk Indonesia.⁹

Akibat tekanan dan kecurigaan pihak penjajah tersebut, pendidikan yang dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam mengambil sikap dan langkah dikotomi yang radikal. Mereka hanya mempelajari ilmu-ilmu agama dan tidak mau mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum, karena dianggap produk Barat. Bahkan sebagian pondok pesantren dan madrasah enggan mempelajari tulisan huruf Latin karena juga dianggap berasal dari Barat dan mereka hanya mau mempelajari huruf Arab. Akibatnya banyak masyarakat era penjajahan yang buta aksara huruf Latin dan hanya bisa membaca dan menulis dengan huruf Arab dan Arab Melayu.

Meskipun demikian, dalam perkembangannya kemudian, pesantren banyak mengalami dinamika dan modernisasi menjadi madrasah-madrasah yang juga mengajarkan mata pelajaran umum dan dilaksanakan dengan sistem klasikal.

⁸Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998/1999), h. 2-3.

⁹Departemen Agama RI, *Manajemen Madrasah*, h. 3.

Bermunculan lembaga pendidikan agama yang selain memberikan pendidikan agama, juga umum dan keterampilan. Lembaga pendidikan dimaksud pada umumnya didirikan oleh organisasi-organisasi keislaman yang bersifat swasta, yang tidak terikat dengan pemerintah.

Madrasah-madrasah yang didirikan oleh organisasi-organisasi keislaman diantaranya Muhammadiyah (1912), organisasi ini mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Muallimat, Muballighin/Muballighat dan Madrasah Diniyah; Al-Irsyad (1913) mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tajhiziyah, Muallimin dan Takhassus; Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 1928 mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Awaliyah, Tsanawiyah dan Kuliah Syariah; Nahdlatul Ulama (NU) 1926 mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya; Jamiatul Washliyah (1930) mendirikan Madrasah Tajhiziyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Qismul ‘Ali dan Takhassus.¹⁰

Keberadaan madrasah-madrasah pada mulanya didirikan oleh organisasi-organisasi Islam sebelum era kemerdekaan atau sesudahnya. Baru kemudian setelah merdeka ada di antara madrasah-madrasah tersebut yang dinegerikan oleh pemerintah. Sejalan dengan perkembangan zaman, banyak madrasah yang mengalami perubahan status dari sekolah yang dikelola swasta atau swadaya masyarakat menjadi sekolah negeri, sehingga mendapatkan posisi yang sama dengan sekolah-sekolah umum sederajat. Namun sebagai konsekuensinya banyak

¹⁰Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), h. 15.

madrasah mengalami perubahan dan perombakan, terutama dari segi sistem pendidikan dan muatan kurikulum pelajaran yang diajarkan. Kalau sebelumnya di madrasah semata diajarkan ilmu pengetahuan agama (mata pelajaran agama), maka kemudian berubah, mata pelajaran agama menjadi 70 % dan umum 30 %. Sesudah itu berubah lagi, pelajaran agama 30 % dan umum 70 %, hal ini sesuai dengan kurikulum nasional yang diberlakukan oleh pemerintah kepada madrasah negeri dan madrasah swasta yang ingin disejajarkan dengan madrasah/sekolah negeri.¹¹

Perubahan ini mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu SK Menteri Agama Nomor 6 tahun 1975, SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37/U/1975 dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 1975 tertanggal 24 Maret 1975 tentang Perubahan Kurikulum Madrasah. Dengan adanya perubahan ini, maka kedudukan madrasah setara/ sederajat dengan sekolah umum, dalam arti Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP dan Madrasah Aliyah (MA) sederajat dengan SMA. Lulusannya boleh melanjutkan ke sekolah lain yang berbeda, misalnya lulusan SMP boleh melanjutkan ke MA, atau sebaliknya lulusan MTs boleh melanjutkan ke SMA atau sebaliknya.¹²

Penegerian sekolah/madrasah pada umumnya disebabkan adanya peluang yang diberikan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama. Namun kebanyakan juga disebabkan keterbatasan kemampuan pengelolanya, baik dari

¹¹ Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, h. 12.

¹² Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah*, h. 12.

segi sumber daya manusia, sumber dana maupun sarana dan prasarana pendidikan. Semua itu sejalan dengan kontribusi masyarakat dan berbagai pihak yang mungkin semakin berkurang, sehingga pihak pengelola kewalahan dan sebagai solusinya dilakukan penegerian. Hal itu dianggap lebih baik dibandingkan madrasah tersebut berhenti beroperasi atau berada dalam status hidup segan mati tak mau.

Meskipun demikian, tidak sedikit organisasi dan berbagai pegiat pendidikan tetap bersemangat dalam mendirikan madrasah swasta. Mereka mendirikan organisasi, yayasan, badan dan sebagainya untuk menyelenggarakan satuan-satuan pendidikan tertentu, dengan memberikan ciri khas dan keunggulan tertentu yang mampu menarik minat masyarakat dan sejalan dengan kebutuhan serta perkembangan zaman. Ketika suatu satuan pendidikan dikelola dengan baik dan profesional dan mampu menampilkan keunggulan-keunggulan lebih dari sekolah-sekolah lain, maka tidak mustahil sekolah/madrasah tersebut berkembang secara kompetitif bahkan diminati oleh masyarakat.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pasal 4 ayat (6) menyatakan, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Pasal 6 ayat (2) menyatakan, setiap warganegara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Pasal 8 menyatakan, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 menyatakan, masyarakat berkewajiban memberikan

dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pasal 55 menyebutkan, masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Pemerintah juga mendorong agar masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, sebab menyelenggarakan pendidikan pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat/orangtua dan pihak sekolah. Lahirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah mendorong demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Bupati/Walikota untuk membangun dan mengurus daerahnya sendiri termasuk dalam pendidikan. Lembaga-lembaga persekolahan diberi kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri dan mengelola kegiatan pendidikan dengan ciri khas dan keunggulan tertentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerahnya masing-masing, untuk menyediakan sumber daya manusia yang produktif dan mempunyai kemampuan profesional diperlukan suatu perubahan yang signifikan yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan.¹³

Pendirian, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan bukanlah pekerjaan sederhana karena usaha tersebut memerlukan adanya sumber daya manusia yang handal, sumber dana, sarana dan prasarana serta perencanaan secara

¹³Ahmad Rohim, *Demokratisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Aswajaya Pressindo, 2012), h, 162.

terpadu dan menyeluruh. Hubungan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga pendidikan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹⁴ Hubungan yang harmonis di antara semua elemen yang ada akan membentuk (1) saling pengertian antara sekolah, orangtua, masyarakat dan lembaga lainnya yang ada dimasyarakat; (2) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui arti dan manfaat masing-masing; (3) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.¹⁵

Mengacu pada Permendiknas No 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan untuk Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Ini merupakan acuan dasar bagi setiap lembaga pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan agar lebih baik, tentunya peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah/madrasah yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, karena pendidikan tidak akan bisa hanya dikelola oleh beberapa orang saja, ia harus melibatkan banyak orang yang saling mendukung keberlangsungan sekolah tersebut. Setiap lembaga yang mau

¹⁴Piet A. Sahertian, *Dimensi Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 233.

¹⁵Daeng Arifin dan Pipin, *Sekolah Mandiri dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Bandung: Pustaka al Kasyaf, 2010), h. 52-53.

berkembang tentunya tidak bisa menutup diri dari kemajuan khususnya dalam pengembangan pendidikan.¹⁶

Meneruskan tradisi para ulama dan tokoh pendidikan terdahulu yang memiliki komitmen tinggi terhadap pendidikan, dan menyikapi dibukanya peluang oleh pemerintah bagi kalangan swasta/masyarakat untuk mengelola pendidikan dengan ciri khas dan keunggulan tertentu, maka berdirilah Yayasan Ukhuwah Banjarmasin. Yayasan Ukhuwah didirikan pada tahun 1993 oleh para tokoh muda yang berlatar belakang pendidikan Timur Tengah, pesantren, dan dari kampus-kampus di pulau Jawa. Yayasan ini merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial, beralamat di Jalan Bumi Mas Raya Kompleks Bumi Handayani XII A, Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Sejak berdirinya hingga sekarang (2016) Yayasan Ukhuwah Banjarmasin telah mampu mendirikan empat satuan pendidikan Islam terpadu, yaitu TKIT/PAUD Ukhuwah, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ukhuwah, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT Ukhuwah) dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu (SMIT) Ukhuwah. Kesemuanya menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik dari jumlah siswanya, guru-gurunya, sarana dan prasarananya dan sebagainya.

Kemampuan mengelola pendidikan di atas didukung oleh faktor-faktor seperti kepengurusan yayasan yang kuat, faktor guru-guru yang diupayakan

¹⁶I . Wayan. AS, *Delapan Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Az-Zahra, 2010), h. 564.

professional sesuai bidangnya dan mengabdikan sepenuh waktu, bahkan gurugurunya juga disekolahkan ke S2 agar lebih profesional. Selain itu dukungan dana, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta dukungan dari para orang tua turut menentukan. Walaupun biaya pendidikan di sekolah ini relatif mahal namun tidak menyurutkan masyarakat (para orangtua) untuk menyekolahkan anaknya di sini. Mereka rela mengeluarkan biaya karena anak-anaknya dididik dan dibina secara penuh waktu di sekolah ini, bahkan makan siang pun di sekolah.

Melihat kenyataan di atas, tampak bahwa sekolah Islam yang berdirinya atas dasar ingin melakukan pembaruan yang lebih baik dalam dunia pendidikan di perkotaan, yang dikelola secara serius dan profesional oleh sebuah yayasan menjadi salah satu faktor besarnya minat masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya sebagai alternatif/pilihan bagi orangtua siswa yang mau menyekolahkan anak, cucunya ke sekolah yang menerapkan pembiasaan akhlak-akhlak islami. Meskipun biaya pendidikan di sekolah ini bagi sebagian masyarakat dianggap relatif mahal, namun mampu memberikan pendidikan yang bermutu dan memiliki keunggulan komparatif di tengah-tengah banyaknya sekolah berlabel plus, model dan unggulan sekarang ini. Ketertarikan orang tua menyekolahkan anak, cucu, serta keluarganya ke lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Ukhuwah, tidak terlepas dari kemampuan yayasan dalam melakukan pengelolaan pendidikan selalu menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan saat ini dengan mengutamakan peningkatan mutu pendidikan di lembaga ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang manajemen pendidikan Sekolah Islam Terpadu yang dilakukan oleh Yayasan Ukhuwah Banjarmasin, khususnya pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ukhuwah . Hasil penelitian ini dijadikan sebuah tesis yang berjudul: “Manajemen Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Ukhuwah Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen kurikulum pada SMPIT Ukhuwah?
2. Bagaimana manajemen ketenagaan pada SMPIT Ukhuwah?
3. Bagaimana manajemen kesiswaan pada SMPIT Ukhuwah?
4. Bagaimana manajemen hubungan masyarakat pada SMPIT Ukhuwah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui manajemen kurikulum pada SMPIT Ukhuwah.
2. Mengetahui manajemen ketenagaan pada SMPIT Ukhuwah.
3. Mengetahui manajemen kesiswaan pada SMPIT Ukhuwah.
4. Mengetahui manajemen hubungan masyarakat pada SMPIT Ukhuwah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat atau kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Aspek teoretis, hasil penelitian ini dapat memperluas serta memperkaya teori-teori tentang manajemen pendidikan, khususnya pendidikan Islam terpadu dan modern melalui peran organisasi, yayasan atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan juga bermanfaat:
 - a. Sebagai bahan telaah bagi instansi terkait dalam menyiapkan kebijakan dan rencana strategis bidang keagamaan khususnya pendidikan di sekolah.
 - b. Sebagai bahan masukan bagi Yayasan Ukhuwah dan SMPIT Ukhuwah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya dalam rangka melakukan inovasi dan pembaruan untuk meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan Islam yang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Sebagai bahan bandingan dan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah ini lebih mendalam atau dengan tinjauan yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Judul dan ruang lingkup penelitian ini ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Manajemen pendidikan, menurut Husaini Usman, adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya, cara pengelolaan atau penyelenggaraan pendidikan.¹⁷

Manajemen pendidikan yang dimaksudkan di sini adalah cara mengelola pendidikan Islam terpadu oleh Yayasan Ukhuwah Banjarmasin pada SMPIT Ukhuwah, mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

2. Secara teoretis menurut Enco Mulyasa terdapat 7 (tujuh) aspek manajemen pendidikan, mencakup manajemen kurikulum, manajemen ketenagaan (sumber daya manusia), manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, manajemen hubungan masyarakat dan manajemen layanan khusus.¹⁸ Mengingat banyaknya aspek manajemen pendidikan tersebut maka dalam penelitian ini aspek manajemen atau pengelolaan pendidikan yang diteliti dibatasi pada empat aspek saja, yaitu manajemen kurikulum, manajemen ketenagaan, manajemen kesiswaan dan manajemen hubungan masyarakat (humas).
3. Sekolah Islam Terpadu yang dikelola oleh Yayasan Ukhuwah mencakup 4 (empat) satuan pendidikan, yaitu PAUD/TKIT, SDIT, SMPIT dan

¹⁷Husaini Usman, *Manajemen Pendidikan Ilmu, Teori dan Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 12.

¹⁸Enco Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 50.

SMAIT Ukhuwah. Penelitian ini dibatasi pada satu lembaga pendidikan saja, yaitu SMPIT Ukhuwah.

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang sama persis dengan yang diteliti ini, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan, di antaranya:

Penelitian Taufik Hidayat (2010) berjudul: *“Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Siti Maryam di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Siti Maryam di Kelayan A Banjarmasin berhasil mengelola pendidikan Islam sejak tingkat Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah Siti Maryam, namun yayasan ini lebih fokus kepada pengelolaan pendidikan Islam sistem madrasah dengan mengadopsi kurikulum pendidikan nasional.

Penelitian Barkatullah (2010), berjudul: *“Tinjauan Terhadap Eksistensi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) Ex Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) MAN Martapura Kabupaten Banjar”*. Penelitian ini menyebutkan bahwa MAPK sebenarnya dapat dikatakan sebagai sekolah model yang memadukan pendidikan agama, umum dan keterampilan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, namun ia kemudian kehilangan ciri khasnya setelah pemerintah mengubahnya menjadi MAK.

Penelitian Noraidah (2011), berjudul: *“Manajemen Pendidikan pada MTsN Model Darussalam Martapura”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

MTsN Model Darussalam Martapura berasal dari MTs Muallimin Darussalam Martapura, yang karena kemajuannya kurang signifikan kemudian dirubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri Model, sementara MTs Antasari Martapura tidak mau dinegerikan atau pun dijadikan madrasah model karena yayasannya cukup kuat dan ingin mandiri. Meskipun berpredikat MTsN Model Martapura namun madrasah ini belum mampu melaksanakan pendidikannya secara *full-day* disertai bahasa Arab dan Inggris disebabkan keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dan keterbatasan kemampuan siswa.

Penelitian Heryadi (2014) berjudul: “*Dinamika Pendidikan Nahdlatul Ulama di Kota Banjarmasin.*” Hasil penelitian menginformasikan bahwa NU Kota Banjarmasin setidaknya memiliki dua yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu Yayasan Sinar Islam yang mengelola MI dan MTs Normal Islam yang beralamat di Jalan Ahmad Yani km 5, dan Yayasan NU yang mengelola SMP dan SMK NU di Jalan Rantauan Timur II Pekauman Banjarmasin. Kedua yayasan ini cukup mampu mengelola pendidikannya dengan mengadopsi kurikulum pendidikan nasional, meskipun kemajuannya masih mengalami pasang surut. Keempat madrasah/sekolah masih mengalami kendala terutama di bidang SDM, sarana dan prasarana serta pendanaan, dan belum sampai kepada pengelolaan pendidikan Islam secara terpadu.

Melihat empat penelitian terdahulu, jelaslah berbeda dengan yang penulis lakukan, baik tema maupun lokasinya, sebab penelitian ini memfokuskan manajemen pendidikan Islam terpadu yang dilaksanakan oleh Yayasan Ukhuwah pada SMPIT Ukhuwah Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab, yang garis besarnya sebagai berikut:

Bab I adalah bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kerangka teori, yang menguraikan tentang sejarah singkat munculnya madrasah/sekolah Islam, desain pengembangan madrasah/sekolah Islam, urgensi manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen pendidikan.

Bab III berisi metode penelitian, yang mengemukakan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian, yang mendiskripsikan tentang lokasi penelitian dan hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan pembahasan atau analisis data.

Bab V adalah bagian penutup, yang berisi simpulan dan saran.